



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015

**Silvia Amalia,
Aditya Septiani¹**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The company as a taxpayer has an obligation to pay taxes to the state in accordance with the applicable laws and regulations. The tax paid is important for the state as a source of state revenue to function as a driver of the country's economic growth and development, while for the company will be a reduction in corporate profits. Tax avoidance can be done legally by the management by observing existing tax regulations and then looking for weaknesses of the regulation to be used as tax evasion. The implementation of corporate governance in companies is important because it helps internal and external parties of the company to see whether the company follows the principles of good corporate governance, and also helps the government to see violations committed by the company in the company's financial statements.

Based on agency theory, the concept of corporate governance is an agency conflict control effort, where corporate governance regulates and overcomes management behavior that prioritizes personal interests so that there can be harmony between the interests of shareholders and managers.

The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2011-2015. The sampling method used is the probability method with the sampling technique using judgment sampling method. The number of companies that were sampled were 32 companies. Data taken from the company's annual report were analyzed using multiple regression analysis.

The results of this study indicate that independent commissioners, audit committees, have a positive effect on tax avoidance, while institutional ownership, board of commissioners, and audit quality have a negative and significant effect on tax avoidance. Implications in this study are expected to provide information for users of related financial statements in policy making to help increase company value and improve, evaluate and improve management performance in the future.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, agency theory, annual report

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki suatu kewajiban dalam membayar pajaknya kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan penting bagi negara sebagai sumber penerimaan negara berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut, sedangkan bagi perusahaan akan menjadi item pengurang laba perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal bisa dilakukan oleh pihak manajemen dilakukan dengan cara melihat peraturan-peraturan perpajakan yang ada kemudian mencari kelemahan-kelemahan peraturan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan penting karena membantu pihak internal dan eksternal perusahaan untuk melihat apakah perusahaan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan juga membantu pemerintah untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan.

Suatu perusahaan memerlukan sebuah tata kelola pada sektor perusahaan yang baik untuk bisa bersaing dalam bisnis global. Tata kelola pada sektor perusahaan (*corporate governance*) dijelaskan sebagai suatu sistem, struktur dan mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar tercapai keseimbangan antar pemangku kepentingan perusahaan supaya perusahaan dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan sehingga perusahaan dapat tetap berlangsung eksistensinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham (*shareholders*) maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan diterapkannya *corporate governance* dalam perusahaan maka hal ini akan membantu pihak internal dan eksternal perusahaan untuk melihat apakah perusahaan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagi pemerintah, penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada suatu perusahaan membantu pemerintah untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan mereka. Dalam bidang keuangan, pelanggaran yang dapat terjadi di perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana wajib pajak badan berusaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka untuk meningkatkan penghasilan. Namun bagi pemerintah, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki porsi cukup besar, sehingga pemerintah menaruh perhatian tinggi dalam sektor pajak. Selain itu pajak merupakan penopang anggaran sehingga laju pertumbuhan dan pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemerintah menertibkan para wajib pajak agar membayar pajak usahanya.

Merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk mematuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya, tidak hanya terhadap pemegang saham atau kreditur, tapi juga bagi negara dalam bentuk taat membayar pajak. Penerapan *corporate governance* yang baik kemudian akan mampu meningkatkan pertanggungjawaban perpajakan perusahaan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terdapat *research gap* yaitu perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Corporate governance* diharapkan dapat menjadi jembatan pemikiran bagi Wajib Pajak bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ditaati dan bukan merupakan beban yang harus dihindari.

Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dalam pengaruh *corporate governance* pada *tax avoidance* adalah dikarenakan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari berbagai sub sektor dan lebih banyak dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, selain itu sektor manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) nasional, dan juga menurut mucglobal.com/news (2014) sektor manufaktur merupakan penyumbang pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2013. Selain itu, sektor perusahaan manufaktur cenderung sering terjadi perilaku *tax avoidance* sehingga penelitian terhadap sektor ini penting untuk diteliti.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham (*shareholders*), dimana pihak manajemen sebagai pekerja kelas atas pada dasarnya cenderung bekerja untuk kepentingan sendiri sehingga dibutuhkan suatu mekanisme agar pihak manajemen patuh terhadap pemegang saham untuk bekerja bagi perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Artinya dalam hubungan keagenan adalah, terdapat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan, sehingga ada perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Darwin (2004) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan pemilik dan agen karena agen bertindak tidak sesuai harapan dari prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan mampu menerangkan potensi konflik kepentingan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan tersebut. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan *Agency* (Lisna Untari, 2010) yaitu, 1) Masalah *Agency* yang timbul pada saat tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan *verifikasi* tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen, dan

2) Masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.

Berdasarkan teori agensi, konsep *corporate governance* menjadi upaya pengendalian konflik keagenan, dimana *corporate governance* mengatur dan mengatasi perilaku manajemen yang mengutamakan kepentingan pribadi sehingga dapat terjadi keselarasan antara kepentingan pemegang saham dan manajer. Bagian dari *Corporate governance* misalnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dapat sebagai mekanisme kontrol yang baik dalam memperkecil konflik keagenan dalam perusahaan. Komite Nasional GCG Indonesia menjelaskan bahwa *Corporate Governance (GCG)* merupakan pola, hubungan, sistem dan proses yang dipakai perusahaan (komisaris dan direksi) yang dapat menjadi nilai tambah pada pemegang saham secara kontinyu dalam jangka panjang, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap melihat kepentingan stakeholders lainnya. Hubungan, Pola, sistem, serta proses berjalan berlandaskan 4 prinsip yaitu: transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas.

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi misalnya perusahaan perusahaan investasi, asuransi, dan perbankan (Moradi, 2012). Investor institusional dapat berperan untuk memonitor manajer perusahaan. Disamping itu, investor institusional memiliki akses informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti pengetahuan tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011). Hal tersebut muncul dari asumsi bahwa investor tersebut memiliki insentif dan dapat memonitor manajemen secara efisien.

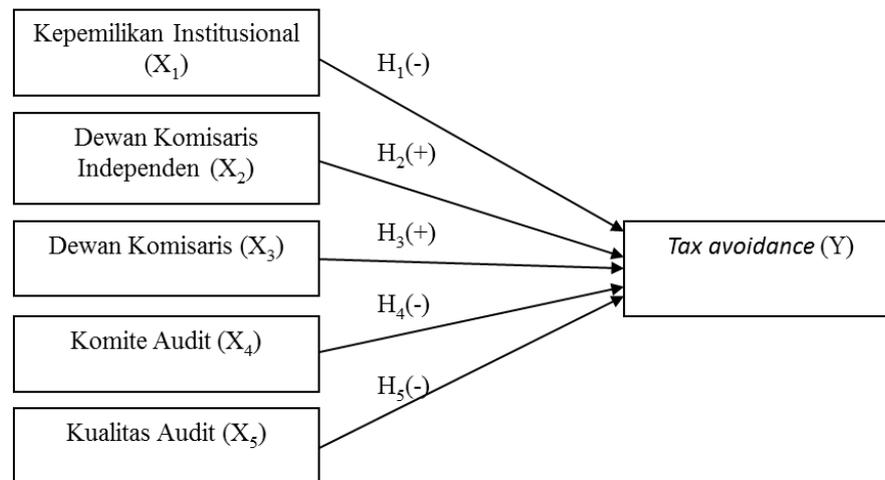
komisaris independen membantu dalam mengatasi konflik keagenan sebab komisaris independen bisa mengkomunikasikan tujuan dari para pemegang saham dengan para manajer. Komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance (corporate governance)* dengan tugas menjamin strategi perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap manajer, terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas dalam perusahaan (Purwaningtyas, 2011). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang merupakan mekanisme / prosedur internal yang utama yang dapat melakukan pengawasan terhadap manajer, dapat mencegah manajemen melakukan tindakan yang bisa merugikan pemegang saham sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang (Fama, 1980). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Untuk itu persentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Salah satu mekanisme dari sistem *corporate governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Sebagai bagian dari *corporate governance* komite audit melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan terhadap perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusutan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen.

Faktor kualitas audit merupakan faktor penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit merupakan indikator utama dalam memilih auditor. Maksudnya, pertimbangan utama untuk menetapkan auditor tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* mempunyai kualitas lebih dibandingkan KAP non *Big Four* sebab lebih berpengalaman melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya besar sehingga mampu memperkecil adanya praktik manajemen laba, bahkan diharapkan menciptakan keakuratan dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Dianing Ratna Wijayani (2016) dengan hasil penelitian menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin meningkatnya kepemilikan institusional, maka *tax avoidance* akan menurun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dengan hasil penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan antara jumlah dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris independen, maka *tax avoidance* akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax avoidance*

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Bernard (2011) dengan hasil penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan antara jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris, maka *tax avoidance* akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dengan hasil penelitian menemukan hubungan negatif dan signifikan antara jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin meningkatnya jumlah komite audit, maka *tax avoidance* akan menurun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dengan hasil penelitian menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin meningkatnya kualitas audit, maka *tax avoidance* akan menurun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Lanis dan Richardson (2013), *tax avoidance* bisa diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). ETR diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak. Pengukuran kepemilikan saham institusional dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki investor institusi dengan total lembar saham yang beredar. Proksi dewan komisaris independen adalah persentase jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap Jumlah Dewan Komisaris secara keseluruhan yang ada didalam susunan dewan komisaris perusahaan tersebut (Ernawati dan Puspitasari, 2010). Perhitungan ukuran dewan komisaris dalam penelitian yaitu jumlah dewan komisaris suatu perusahaan secara keseluruhan, baik dewan komisaris independen maupun dewan komisaris internal. Menghitung proksi Komite Audit adalah dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang disebutkan dalam laporan keuangan tahunan. Perhitungan Kualitas Audit adalah dengan *variable dummy* dimana 0 untuk Auditor dari KAP *non-The Big Four*, dan 1 dari Auditor dari KAP *The Big Four*.

Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode tahun penelitian. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgment sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Adapun ketentuan sampel yang diambil adalah 1) Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2011-2015, 2) Perusahaan menyertakan laporan keuangan berturut-turut tahun 2011-2015, 3) Perusahaan mengalami profit positif (laba) berturut-turut tahun 2011-2015, dan 4) Perusahaan melakukan pembayaran pajak berturut-turut tahun 2011-2015.

Analisis Regresi Berganda

Suatu analisa yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah diolah dengan angka-angka dan pembahasan melalui perhitungan statistik. Dalam analisis inferensial alat analisis yang digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS (Ghozali, 2013). Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- Y : *Tax avoidance*
- X₁ : Kepemilikan Institusional
- X₂ : Dewan Komisaris Independen
- X₃ : Dewan Komisaris
- X₄ : Komite Audit
- X₅ : Kualitas Audit
- α : Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_5$: Koefisien regresi
- e : *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode tahun penelitian. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgment sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 1
Ringkasan Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2011-2015	146
Perusahaan yang tidak menyertakan laporan keuangan secara kontinyu dalam periode tahun 2011-2015	(55)
Perusahaan yang mengalami profit negatif (rugi) dalam periode tahun 2011-2015	(47)
Perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak secara kontinyu selama periode tahun 2011-2015	(12)
Jumlah sampel akhir perusahaan 2011-2015 yang dapat diolah	32
Jumlah Data Penelitian x5 tahun	160

Sumber : data yang diolah, 2018

Sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh setelah melakukan seleksi adalah sebanyak 32 perusahaan dalam periode 5 tahun yaitu 2011-2015. Sehingga didapatkan hasil data sampel penelitian yang kemudian dapat digunakan didalam penelitian ini adalah sejumlah 160 data.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data-data sampel penelitian yang dilihat dari nilai minimum atau nilai terendah, nilai maximum atau nilai tertinggi, mean atau rata-rata, dan standar deviasi dari variabel penelitian dalam pengujian pengaruh *Corporate Governance* meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* untuk periode pengamatan tahun 2011-2015.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	160	0,00	99,47	71,7887	20,02907
Komisaris Independen	160	0,00	80,00	39,4062	12,94965
Dewan Komisaris	160	2	9	5,06	1,807
Komite Audit	160	3	4	3,16	0,364
Kualitas Audit	160	0	1	0,66	0,476
ETR	160	0,08	0,08	0,2731	0,14759
Valid N (listwise)	160				

Sumber : data yang diolah, 2018

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 99,47 dengan nilai rata-ratanya positif sebesar 71,7887 serta standar deviasi 20,02907. Artinya, rata-rata saham perusahaan sampel yang dimiliki oleh pihak luar berupa institusi adalah sebesar 72%, kemudian jumlah saham terkecil yang dimiliki oleh institusi adalah sebesar 0%, dan yang terbesar terdapat sebesar 99,5% saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Dalam tabel ini juga menunjukkan bahwa data sampel yang kurang bervariasi karena ditemukan nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

Dewan Komisaris Independen memiliki jumlah rata-rata (*mean*) positif yaitu sebesar 39,4062. Artinya, persentase perbandingan antara jumlah Dewan Komisaris Independen dengan total Dewan Komisaris yang terdapat didalam perusahaan adalah sebanyak 39%. Nilai minimum Dewan Komisaris Independen adalah sebesar 0,00 atau dalam persentase sebesar 0% dan nilai maksimumnya adalah sebesar 80,00 atau dalam persentase sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sampel penelitian tersebut, masih ada perusahaan yang tidak memenuhi peraturan Bapepam yang menyatakan bahwa persentase Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan harus ada minimal sebanyak 30%. Namun untuk penellitian ini rata-rata perusahaan telah mencapai batas minimal tersebut yaitu sebanyak 39%. Ditemukan juga bahwa nilai standar deviasi Dewan Komisaris Independen adalah sebesar 12,94965 yang artinya lebih kecil dari rata-rata sehingga diketahui data kurang bervariasi.

Variabel ukuran Dewan Komisaris, ditemukan memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 9, dengan nilai rata-ratanya sebesar 5,06. Maka dapat diartikan bahwa perusahaan sampel penelitian ini, rata-rata memiliki jumlah Dewan Komisaris sebanyak 5 orang. Standar deviasi untuk Dewan Komisaris adalah sebesar 1,807, sehingga diketahui standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi.

Variabel Komite Audit memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu sebesar 3,16 atau sebanyak 3 orang, dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimumnya sebesar 4. Artinya, seluruh perusahaan sampel penelitian telah memenuhi syarat Bapepam bahwa sekurang-kurangnya komite audit berjumlah 3 orang dengan beranggotakan minimal 1 orang komisaris dan minimal 2 orang yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Ada sebesar 0,364 nilai standar deviasi yang ditemukan, artinya data kurang bervariasi.

Variabel Kualitas Audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimal 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,66 atau 66%. Artinya, terdapat sebesar 66% perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang menghasilkan kualitas audit yang baik karena telah diaudit oleh Auditor dari KAP *The Big Four*. Juga ditemukan bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi yang ditemukan sebesar 0,476 yaitu lebih kecil dari nilai rata-rata.

Tax Avoidance, yang diukur menggunakan proksi *Efective Tax Rates* (ETR), secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu sebesar 0,2731 dengan nilai minimal sebesar 0,08 dan nilai maksimal sebesar 1,72. Nilai rata-rata yang ditemukan sebesar 27,31% adalah persentase nilai ETR yang ditemukan, yang artinya cukup rendah dan berpotensi adanya indikasi penghindaran pajak karena perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak akan berusaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan cara tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan suatu tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen kepada variabel dependen dengan menggunakan skala pengukuran dalam suatu persamaan linier.

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.010	.005		-1.899	.059
1 Kepemilikan Institusi	-.001	.000	-.304	-4.251	.000
Komisaris Independen	.001	.000	.336	4.598	.000
Dewan Komisaris	.001	.000	.125	1.755	.081
Komite Audit	.012	.001	.588	8.290	.000
Kualitas Audit	-.004	.001	-.286	-4.264	.000

Sumber : data yang diolah, 2018

$$Y = -0,304 X_1 + 0,336X_2 + 0,125 X_3 + 0,588 X_4 - 0,286X_5$$

Berdasarkan persamaan yang telah dijabarkan di atas maka dapat diketahui hasil bahwa komisaris independen, dewan komisaris dan komite audit mempunyai pengaruh yang positif *atastax avoidance*, dengan nilai koefisien regresi masing-masing adalah: untuk komisaris independen sebesar 0,336; sedangkan untuk dewan komisaris sebesar 0,125; dan untuk komite audit sendiri sebesar 0,588 selain itu untuk kepemilikan institusi dan kualitas audit ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan nilai koefisien regresi masing-masing kepemilikan institusi sebesar -0,304 dan kualitas audit sebesar -0,286.

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu uji statistik yang digunakan untuk mencari tahu apakah data yang dikumpulkan baik variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dan untuk memastikannya bisa didapat dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00576505
Most Extreme Differences	Absolute	0,171
	Positive	0,171
	Negative	-0,124
Kolmogorov-Smirnov Z		0,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,081

Sumber : data yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat signifikan variabel penelitian $0,081 > 0,05$ maka model regresi terdistribusi normal, oleh sebab itu dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu model olah data statistik untuk mencari tahu apakah kesalahan observasi data saling berhubungan atau berkorelasi satu dengan yang lainnya. Cara pengujian uji autokorelasi adalah dengan digunakannya Statistik *d Durbin-Watson (The Durbin-Watson d Statistic)*.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada pengganggu periode t-1.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.612 ^a	.374	.354	.00585789	1.919

Sumber : data yang diolah, 2018

Dari hasil yang didapatkan dalam tabel 4.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 1,919 dan dibandingkan dengan batas atas (du) dan (4-du), dimana du sendiri diketahui adalah sebesar 1,806 sehingga hasil DW berada diantara 1,806 dan 2,194 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan untuk semua variabel bebas yang dilakukan pengujian. Yang paling baik adalah model regresi yang tidak ditemukan heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.002	.001		2.719	.007
1 Kepemilikan Institusi	-1.602	.000	-.038	-.426	.671
Komisaris Independen	-7.523	.000	-.114	-1.266	.207
Dewan Komisaris	-6.455	.000	-.137	-1.556	.122
Komite Audit	-2.341	.000	-.010	-.114	.909
Kualitas Audit	.000	.000	.131	1.586	.115

Sumber : data yang diolah, 2018

Dilihat dari hasil yang didapat pada tabel di atas maka tidak terdapat heteroskedastisitas dikarenakan tingkat signifikan yang ditemukan pada variabel adalah besarnya diatas 0,05.

Multikolinieritas

Dilakukannya pengujian multikolinieritas adalah untuk dapat diketahui apakah terdapat hubungan linear yang "sempurna" diantara sejumlah atau seluruh variabel independen yang menjelaskan model regresi. Adapun yang paling baik adalah model regresi seharusnya tidak memiliki hubungan korelasi antar variabel independen.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kepemilikan Institusi	.796	1.257
Komisaris Independen	.763	1.311
Dewan Komisaris	.804	1.244
Komite Audit	.807	1.239
Kualitas Audit	.904	1.106

Dapat dilihat dari tabel 4.6 di atas bahwa model regresi yang ditemukan adalah yang bebas multikolinieritas dikarenakan hasil koefisien regresi antar variabel independen yang ditemukan memiliki nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10.

Koefisien Determinasi (R²)

Dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square*, yaitu suatu koefisien determinasi (R²) yang diperlukan untuk mengukur seberapa jauhkah potensi variabel independen penelitian dalam kemampuannya menjelaskan variasi variabel dependen penelitian.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.612 ^a	.374	.354	.00585789

Disajikan pada tabel di atas adalah hasil dari pengujian uji regresi yang kemudian mendapatkan temuan angka koefisien *adjusted R Square* yaitu ialah sebesar 0,354 yang berarti bahwa ada sebesar 35,4% *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Sedangkan sisanya yaitu ialah sebesar 100% - 35,4% = 64,6% kemudian dapat diterangkan dengan variabel yang lain di luar model.

Uji Statistik F

Penelitian menggunakan juga Uji F untuk menrekognisi apa pengaruh variabel independen bagi variabel dependen dan juga untuk memperlihatkan kelayakan model persamaan regresi dalam penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	5	.001	18.416	.000 ^a
	Residual	.005	154	.000		
	Total	.008	159			

Sumber : data yang diolah, 2018

Melihat atas dasar tabel di atas, maka didapatkan hasil perhitungan F sebesar 18,416 dan juga dengan tingkat probabilitas $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat diketahui ada pengaruh *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* secara simultan atau bersama-sama, dan juga menjelaskan bahwa model regresi yang digunakan ialah terkulifikasi untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian analisis regresi diperoleh koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,304 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance pada* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, berarti hipotesis pertama (H_1), diterima. Ketika kepemilikan institusional menurun, maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010), Anissa Setiawati Putranti dan Yulita Setiawanta (2013) serta Dianing Ratna Wijayani (2016) yang menghasilkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian analisis regresi diperoleh koefisien regresi komisaris independen sebesar 0,336 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance pada* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, berarti hipotesis kedua (H_2), diterima. Dengan demikian didapat hasil penelitian bahwa ketika dewan komisaris independen bertambah, maka *tax avoidance* akan ikut bertambah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menghasilkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian analisis regresi diperoleh koefisien regresi dewan komisaris sebesar 0,125 dan tingkat signifikan sebesar $0,081 > 0,05$, maka variabel dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance pada* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, berarti hipotesis ketiga (H_3), diterima, dengan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan berubahnya jumlah dewan komisaris, maka tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menghasilkan dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian analisis regresi diperoleh koefisien regresi komite audit sebesar 0,588 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance pada* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, berarti hipotesis keempat (H_4), ditolak. Dengan demikian hasil penelitian semakin

banyak jumlah komite audit, maka *tax avoidance* akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) serta Hustna Dara Sarra (2017) yang menghasilkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian analisis regresi diperoleh koefisien regresi kualitas audit sebesar $-0,286$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, berarti hipotesis kelima (H_5), diterima. Dengan demikian hasil penelitian semakin tinggi kualitas audit, maka *tax avoidance* akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menghasilkan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Atas pelaksanaan analisis data penelitian, peneliti kemudian menyimpulkan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional dan variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel komisaris independen, dewan komisaris, dan variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini 1) dalam tindakan pengujian penelitian ini, peneliti semata-mata memfokuskan terhadap perusahaan manufaktur saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan pada sektor lain tidak dipertimbangkan sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia karena setiap sektor perusahaan memiliki kekhasan masing-masing, 2) koefisien determinasi penelitian ini menghasilkan nilai R Square sebesar $0,354$ yang artinya dalam penelitian ini hanya sebesar $35,4\%$ *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini (persentase kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, dan kualitas audit), sedangkan sisanya ada sebesar $64,7\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang berpengaruh pada *tax avoidance* tapi belum diuji di penelitian ini, dan 3) penelitian ini tidak mampu menangkap fenomena variabel kepemilikan institusional dengan baik dikarenakan pada data yang dikumpulkan dalam informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan ditemukan jumlah minimum kepemilikan institusional sebesar 0% dimana artinya terdapat badan usaha perusahaan sampel dengan kepemilikan institusional yang sangat kecil dan digabungkan dengan kepemilikan oleh masyarakat.

Atas keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka saran-saran yang perlu diperhatikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya untuk meneliti sektor lain dalam penelitian terkhusus seperti sektor properti, jasa, dan perbankan. Dan diharapkan bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya mampu menambahkan variabel-variabel penelitian tambahan, lebih dari penelitian sebelumnya, yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya supaya hasil yang didapat nantinya akan menghasilkan kesimpulan lebih baik mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*.

REFERENSI

- Amstrong, Christopher S., Blouin, Jennifer L dan Larcker, David F. (2012). *The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics*, 53, 391- 411.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus, 2012. "Pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax avoidance*." *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8. No2.
- Anwar, Chairil. 2011. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan. Pajak dan Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bernard, Sinaga. 2011. Pengaruh Karakteristik *corporate governance*, kompensasi terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-41.

- Budiman, Judi dan Setiyono, 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of Financial Economics* 95, 41–61.
- FCGI, 2004. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, Umi. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-11.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *ED PSAK No. 01 (Revisi 2009)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Masri, Indah dan Martani, Dwi. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Ratnasari, Yunita. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam *Sustainability Report*. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia, Surat Direktur Jendral Pajak No. 5-14/Pj.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Setiyawati, Eka. 2015. Pengaruh Spesialisasi KAP terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Scott, W., R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Toronto Canada: Prentice-Hall.
- Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung : CV. Alfabeta